

KUISIONER PENYELENGGARAAN PBG DAN SLF

Kab/Kota Pasaman Barat

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	OPD, Bidang dan Seksi yg memproses PBG dan SLF (SIMBG)?	OPD yang mengelola penyelenggaraan PBG Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat Bidang Cipta Karya (Rekomendasi Teknis), sedangkan PBG nya diterbitkan Oleh DPMPTSP	
2	Berapa lama SOP pengurusan PBG dan SLF? (dari penyiapan data sampai rekomendasi teknis)	Maksimal 27 Hari Kerja sejak terverifikasi pada SIMBG	
3	Berapa rata-rata waktu real pengurusan PBG dan SLF? (terbitnya PBG)	Satu Bulan	
4	Apa kendala dimasyarakat pada saat pengurusan PBG dan SLF?	1. Persyaratan PBG secara online dengan SIMBG lebih membahas teknis secara mendalam dibandingkan dengan IMB yang dilakukan secara manual. Jadi pemohon wajib menggunakan jasa konsultan/ perencana bersertifikat ahli dalam penyusunan PBG. 2. Dengan melibatkan konsultan bersertifikat/ tim ahli, otomatis harus mengeluarkan biaya lebih tergantung kesepakatan/ kontrak antara konsultan tersebut dengan pemohon PBG, jika pemohon tidak siap dengan biaya biasanya tidak akan meneruskan pengurusan PBG	
5	Apa kendala di penyelenggara PBG dan SLF (OPD Teknis) ?	Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki RDTR yang terintegrasi dengan ISS, jadi pemohon masih harus mengurus sebagian perizinan tata ruang secara manual dan jika pemohon/ investor berasal dari luar daerah akan kesulitan harus bolak balik ke pasaman barat.	
6	Sudah berapa PBG dan SLF yang diterbitkan sejak 2021 (rician pertahun)	Menunggu data dari DPMPTSP	
7	Berapa orang Tim Profesional Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) di Kab/Kota ...	5 orang TPA/ 4 orang TPT	TPA : 1. Oscar Fithrah Nur, S.T., M.T. 2. Dr. I Nengah Tela, S.T. M.Sc. 3. Ir. Antonov, S.T., M.T.IPM 4. Prof. Dr. Nasfryzal Carlo 5. Ir. Nasirman Can, S.T. IPM.CSE,ASEAN Eng
8	Apakah penyelenggara PBG melaksanakan sosialisasi dan dalam bentuk apa?	Dalam bentuk Sosialisasi penyelenggaraan PBG melalui SIMBG (PP 16 Tahun 2021) kepada pada Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Apakah penetapan SHST oleh Kepala Daerah ? Kalau belum apa sebabnya?	Ada, Perbub No. 34 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2024	
10	Apakah Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ Kota sudah mempunyai PBG dan SLF?	Belum semua	
11	Berapa Persentase BGN yang sudah mempunyai PBG dan SLF dari jumlah total BGN di Kabupaten/ Kota ?	Tidak dapat dihitung, karena belum adanya data yang valid	
12	Pada SIMBG terdapat proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, di antara item ini proses apa saja yg sudah dilaksanakan penyelenggaraan SIMBG ?	PBG dan SLF	SBKBG belum terakomodir pada menu SIMBG
13	Kalau belum semua, apa penyebabnya?	SBKBG belum terakomodir dalam SIMBG versi sekarang, RTB belum ada yang mengajukan	
14	Apakah ada dilakukan pengawasan berkala terhadap perizinan yg telah diterbitkan?	Pengawasan perizinan berada pada Bidang Pengawasan dari DPMPTSP	
15	Apakah ada sanksi pemilik bangunan gedung untuk pembangunan yang tidak sesuai PBG yg sudah diterbitkan (luasan, desain, RTH, sanitasi, dll)? Apa bentuk sanksinya ?	Belum ada	
16	Dalam penyelenggaraan PBG dan SLF apakah sudah mengacu sepenuhnya pada PP No. 16 Tahun 2021?	Sudah	
17	Terkait dengan retribusi, apakah sudah ada Perda retribusi untuk PBG dan SLF?	Ada, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
18	Apakah ada aturan-aturan tambahan yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait PBG dan SLF?	Tidak	
19	Apakah sudah ada Perda RDTR dan RTBL, kalau belum prosesnya sudah sampai dimana?	Belum, ada proses menjadikan perda	
20	OPD Teknis, apakah sudah ada tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara yang bersertifikat ? Kalau ada, berapa orang?	Tidak ada	

(1)	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(2)	(3)	(4)	

30 Oktober 2024

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
UPTD P2BG Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

1. Iskrena

2. MUTIA FITRIANI

3. _____

4. _____

5. _____
- 

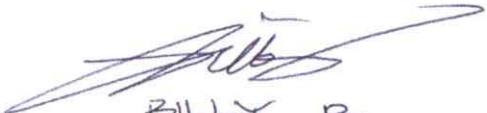

Diketahui Oleh :

Kepala UPTD P2BG
Dinas BMCKTR Prov. Sumbar



Yudi Herawan, S.T., M.T.
Nip. 19740311 199803 1 003

JF TATA BANGUNAN & PER.
AHLI MUDA



BILLY R
NIP 19830104201011001

JF TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI PERTAMA



YOSI FEBRINA SARI, ST
NIP. 19960208 201902 2 001